

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan Implementasi Program Penanganan Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dilihat dari tiga fokus yang sesuai dengan teori implementasi David C. Korten dapat disimpulkan :

1. Implementasi berdasarkan variabel program yang meliputi perencanaan dan penganggaran. Didalam variabel ini, aspirasi masyarakat menjadi awal dari perencanaan. Masyarakat melapor mengenai daerahnya yang masih sering terjadi banjir, kemudian akan ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR-PKP. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan bersifat *bottom-up*. Tentu dalam pelaksanaan perencanaan drainase melibatkan PT. Reno Abirama Sakti sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan selama proses konstruksi berlangsung dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Perencanaan selalu menjadi tahap awal yang harus dilaksanakan, sama halnya dengan penganggaran. Penganggaran ditentukan sesuai dengan kompleksitas konstruksi dan mengacu pada DPA. Tetapi, untuk penganggaran sumur resapan ditentukan sekitar 1 Miliar per tahun sehingga jumlah proyek menyesuaikan anggaran tersebut.
2. Implementasi berdasarkan variabel organisasi pelaksana yang meliputi tim pelaksana dan prosedur pelaksanaan. Didalam variabel ini, bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Keputusan Kepala Dinas

PUPR-PKP Kota Malang Nomor 188.47/22/35.73.403/2023 dan melibatkan pihak luar (kontraktor) sebagai pelaksana konstruksi drainase serta Satgas PUPR sebagai pelaksana normalisasi drainase. Sama halnya yang dilakukan oleh bidang Cipta Karya, bedanya belum terdapat rehabilitasi sumur resapan. Prosedur pelaksanaan secara tertulis juga belum tersedia, baik di bidang Bina Marga maupun Cipta Karya.

3. Implementasi berdasarkan variabel kelompok pemanfaat yang meliputi tepat program, tepat pelaksanaan dan tepat sasaran. Tujuan program penanganan banjir ini adalah mengurangi potensi banjir dan menjadikan Kota Malang *zero* banjir. Maka dari itu, telah ditentukan sebanyak 36 titik lokasi yang dijadikan fokus program ini. Dinas PUPR-PKP Kota Malang juga mengacu pada laporan dan keluhan dari masyarakat dalam melaksanakan program penanganan banjir. Dalam pelaksanaan konstruksi drainase dan proyek sumur resapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada tahun 2022-2023 sebanyak 124 lokasi telah diadakan konstruksi drainase dan 116 sumur resapan yang tersebar di seluruh Kota Malang. Dinas PUPR-PKP juga bekerja dengan cepat dan tepat karena banjir merupakan masalah yang krusial. Namun, ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program penanganan banjir yaitu beberapa masyarakat yang menolak pelaksanaan konstruksi drainase dan proyek sumur resapan di daerah permukiman mereka. Dinas PUPR-PKP sebagai pelaksana program memberi pemahaman kepada masyarakat agar proyek tetap dilaksanakan. Alhasil banjir sudah jarang terjadi setiap musim hujan, hanya didapati genangan saja. Masyarakat mengaku kondisi

lingkungan sudah mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan mendapatkan manfaat dari program penanganan banjir.

Dilihat dari analisis ketiga indikator implementasi program menurut David C. Korten, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanganan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sudah terimplementasi dengan cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada terkait Implementasi Program Penanganan Banjir Oleh Dinas PUPR-PKP dilihat dari tiga variabel yang sesuai dengan teori implementasi David C. Korten, berikut saran yang dapat diberikan :

1. Pihak Dinas PUPR-PKP Kota Malang perlu mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program ini karena banjir termasuk masalah publik. Masyarakat dapat mendukung berjalannya program ini dengan tidak menghambat setiap pelaksanaan konstruksi drainase dan proyek sumur resapan. Dalam hal ini, Dinas PUPR-PKP juga melakukan upaya berupa sosialisasi agar masyarakat paham dan secara tidak langsung ikut berkontribusi.
2. Dikarenakan belum tersedianya kegiatan rehabilitasi oleh Bidang Cipta Karya terhadap sumur-sumur resapan yang tersebar di Kota Malang, maka solusinya harus melibatkan masyarakat. Sumur resapan merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas PUPR-PKP dalam mengurangi potensi banjir, maka dari itu masyarakat juga perlu diberi pemahaman untuk turut menjaga sumur-sumur resapan yang ada di lingkungan mereka.